

Laporan kinerja instansi pemerintah
DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT

T.A 2016





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2016. LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2015-2018, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa barat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan diimplementasikan melalui 14 (Empat Belas) program dan 76 kegiatan. Implementasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian kinerja pada tahun 2016 masih berada kerangka perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2015-2018.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ke sebelas sasaran strategis Dinas tersebut telah dapat dipenuhi dengan **tingkat pencapaian keuangan** mencapai **76,74 %** dari total anggaran sebesar **Rp 331.775.008.217** sedangkan tingkat pencapaian fisik mencapai **93,08%**. Belum maksimalnya tingkat capaian tersebut dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap terutama pada program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Hasil pencapaian **Misi 1** Diskimrum pada tahun 2016 adalah sebesar **89,52%** atau terkategori **baik**, pencapaian **Misi 2** sebesar **100,39%** atau terkategori **sangat baik**, pencapaian **Misi 3** pada tahun 2016 adalah sebesar **158,20%** atau terkategori **sangat baik**, pencapaian **Misi 4** pada tahun 2016 adalah sebesar **127,135** atau terkategori **sangat baik**.

Hasil capaian kinerja di atas menjadi motivasi Dinas untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, terutama dalam Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan pada urusan pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang.

Pada masa yang akan datang diharapkan terjadi peningkatan capaian indikator kinerja utama melalui peningkatan perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat 2015-2018.



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

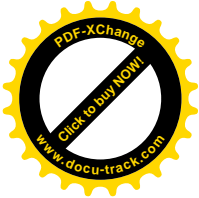
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas membantu Gubernur Jawa Barat dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka menjalankan amanat sesuai tugas dan fungsinya, menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi serta penetapan kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi maka Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga tercapai visi organisasi yaitu "TERWUJUDNYA PERMUKIMAN & PERUMAHAN YANG LAYAK HUNI DALAM MENDUKUNG JAWA BARAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA".

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan. Selama Tahun 2016. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Hal ini diuraikan dalam **LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016** yang memuat gambaran capaian dan evaluasi kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Seluruh kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 telah disajikan berdasarkan pencapaian kinerja Dinas secara transparan dan akuntabel, mudah-mudahan memenuhi harapan berbagai pihak selaku pengambil keputusan.

Bandung, Februari 2017
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat

Ir. Bambang Rianto, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP 19620116 199103 1 004



KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
PROVINSI JAWA BARAT



Ir. BAMBANG Rianto, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP 19620116 199103 1 004



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-1
1.3 Dasar Hukum.....	I-2
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018	II-1
2.1.1 Visi dan Misi.....	II-1
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	II-3
2.1.3 Kebijakan dan Program	II-9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016	II-12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	II-18
2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2016	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
3.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja	III-3
3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	III-7
3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-9



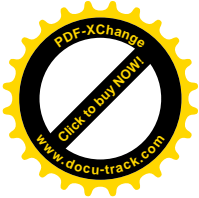
KATA PENGANTAR

3.1.5	Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang	
	Capaian Kinerja	III-11
3.2	Realisasi Anggaran	III-24
BAB IV PENUTUP		IV-1
LAMPIRAN		



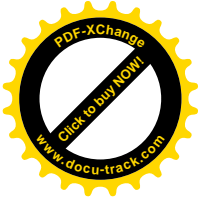
DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi	II-13
Tabel II.2 Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan	II-18
Tabel II.3 Rekap Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 setelah Perubahan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	II-20
Tabel III.1 Skala Penilaian.....	III-1
Tabel III.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja.....	III-4
Tabel III.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014-2016.....	III-7
Tabel III.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2016.....	III-10
Tabel III.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja.....	III-12
Tabel III.6 Rekapitulasi Progres Keuangan dan Fisik Diskimrum Perjenis Belanja T.A.2016.....	III-25



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Hubungan Peraturan Perundangan dalam Pembangunan.....	I-3
Gambar I.2	Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	I-6
Gambar I.3	Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	I-7
Gambar II.1	Arahan Pokok dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Permukiman dan Perumahan	II-3
Gambar III. 1	Sandingan Jumlah Anggaran Tahun 2013-2016.....	III-3
Gambar III. 2	Perbandingan Realiasi Pencapaian Sasaran Strategis Misi..... Renstra Diskimrum Tahun 2014 dan 2015.....	III-3 III-11
Gambar III. 3	Sandingan Jumlah Anggaran Tahun 2013-2016.....	III-24



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Gubernur Jawa Barat
- Lampiran 3. Rencana Kinerja tahun 2016
- Lampiran 4.
- a. Rencana Kerja tahun 2016
 - b. Rencana Aksi Kinerja 2016
 - c. Mekanisme pengumpulan data kinerja tahun 2016
 - d. Monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja tahun 2016
 - e. *Cascading tahun 2016*
 - f. Pohon Kinerja tahun 2017
- Lampiran 5. SK Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
- Lampiran 6. Pohon Kinerja Tahun 2016



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *Good Governance*, di mana sistem pengelolaan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan perencanaan strategik, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

LKIP adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). LKIP ini disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan dapat menjadi acuan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dimaksudkan untuk melaporkan capaian kinerja organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Diskimrum Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Diskimrum Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Diskimrum Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- 1) Mendorong Diskimrum Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat;
- 2) Menjadikan Diskimrum Provinsi Jawa Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
- 3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Diskimrum Provinsi Jawa Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
- 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Barat terhadap penyelenggara Diskimrum Provinsi Jawa Barat.



1.3 Dasar Hukum

Landasan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

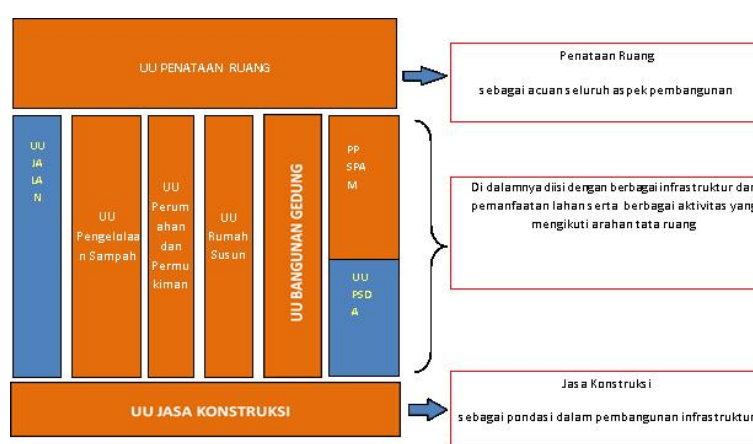
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2005-2025;
- Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2013 – 2018.

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Terdapat beberapa aspek pembangunan yang ada di Dinas Permukiman dan Perumahan yang saling terkait, yaitu Bidang Tata Ruang Kawasan sebagai acuan yang memberikan *platform* (dasar) dan arahan pengembangan wilayah atau kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan yang bernilai strategis di Jawa Barat. Bidang Tata Ruang akan memberikan gambaran yang meliputi potensi, kendala dan limitasi dalam pengembangan wilayah atau kawasan di Jawa Barat, serta rencana dan prioritas pengembangan yang

selanjutnya membutuhkan dukungan permukiman dan perumahan. Setelah itu, Bidang Permukiman dan Perumahan akan mengisi kawasan-kawasan yang diprioritaskan tersebut dengan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut sesuai dengan arahan tata ruang. Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan, Bidang Jasa Konstruksi memberikan kontribusi dukungannya untuk menjamin kualitas konstruksi dan keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Ditinjau dari peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan pembangunan di Bidang Permukiman dan Perumahan, kedudukan serupa juga terjadi, di mana undang-undang penataan ruang akan menjadi payung, yang kemudian diisi sektor-sektor lain sesuai peraturan perundangannya, sedangkan undang-undang Jasa Konstruksi menjadi pondasi seperti di perlihatkan pada **Gambar I.1**.



Gambar I. 1 Hubungan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Bidang Permukiman dan Perumahan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Permukiman dan Perumahan memiliki keterkaitan yang erat dengan OPD lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat baik dari rumpun bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Bina Marga, dan Pengelolaan Sumberdaya Air, serta rumpun bidang Non Pekerjaan Umum seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Lingkungan dan lain-lain. Keterkaitan yang dimaksud adalah pembangunan bidang Permukiman dan Perumahan memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ke-PU-an namun juga memberikan kontribusi dan stimulasi bagi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain melalui prasarana dan sarana permukiman dan perumahan yang dibangun.

Apabila tugas pokok dan fungsi Dinas Permukiman dan Perumahan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Permukiman dan Perumahan terkait dengan 3 bidang, yaitu :



a. **Bidang Pekerjaan Umum**, dari 10 Sub Bidang, ada 8 Sub Bidang terkait Bidang Pekerjaan Umum :

- Perkotaan dan Perdesaan
- Drainase
- Air Minum
- Permukiman
- Air Limbah Domestik
- Bangunan Gedung & Lingkungan
- Persampahan
- Jasa Konstruksi

b. **Bidang Penataan Ruang**, ada 4 Sub Bidang :

- Pengaturan
- Pembangunan
- Pembinaan
- Pengawasan

c. **Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**, ada 7 Sub Bidang :

- Pembiayaan
- Pembinaan Hukum, Peraturan Perundangan dan pertanahan untuk Perumahan
- Pembinaan Perumahan Formal
- Pembinaan Industri dan Teknologi
- Pembinaan Perumahan Swadaya
- Pengembangan pelaku Pembangunan Perumahan Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya
- Pengembangan Kawasan

Penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan yang dituangkan dalam rencana strategis 2013-2018 mengemban misi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama RPJMD 2013-2018 dan juga rencana spasial seperti RTRW Propinsi Jawa Barat. Namun demikian, semua itu dibatasi oleh kewenangan maupun aspek kelembagaan Dinas Permukiman dan Perumahan dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas



Unit dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Permukiman dan Perumahan hanya merupakan salah satu dari banyak pelaku pembangunan, karena sebagian besar urusan kewenangan untuk hal ini ada di kabupaten/kota.

Dalam struktur kelembagaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Dinas Permukiman dan Perumahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi dan peran pembangunan bidang permukiman dan perumahan di wilayah Jawa Barat. Untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008, Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yang masing-masing menangani sektor/urusan tertentu (Bidang Tata Ruang Kawasan, Bidang Permukiman, Bidang Perumahan, Bidang Jasa Konstruksi), 3 (tiga) UPTD (Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan (BPMKL), Balai Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat (BPSR), dan Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan (BP3JB), serta kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

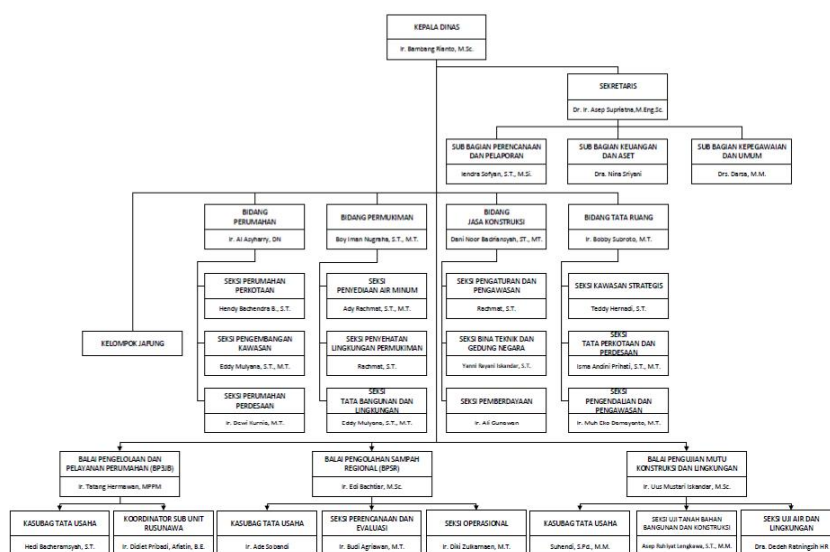
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan;
- Penyelenggaraan urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang permukiman, dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi;
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 Tahun 2010, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat menetapkan Struktur Organisasi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu terbagi pada Bidang dan Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) seksi dan sub bagian, sebagaimana diuraikan pada **Gambar 1.2** berikut ini.



Gambar I.2 Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, ditetapkan 14 (empat belas) Program Strategis, dan Pelaksana Program sesuai Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- Program 1 : Program Sumber Daya Kesehatan;
- Program 2 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
- Program 3 : Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Program 4 : Program Penataan Ruang;
- Program 5 : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Program 6 : Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Program 7 : Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga;
- Program 8 : Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur program adalah Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Permukiman;
- Program 9 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program 10 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program 11 : Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program 12 : Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;



Program 13 : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program 14 : Program Pengembangan Nilai Budaya

Dinas Permukiman dan Perumahan terus berupaya untuk menyelesaikan amanat pembangunan yang terkandung dalam urusan wajib bidang permukiman dan perumahan (keciptakarya) yang terdiri dari bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan. Berikut ini uraian permasalahan utama yang menjadi tantangan Dinas dalam menunjukkan kinerjanya.

➤ **Bidang Pekerjaan Umum**

Permasalahan utama pada Bidang Pekerjaan Umum adalah:

- (1) Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
- (2) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase);
- (3) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional.

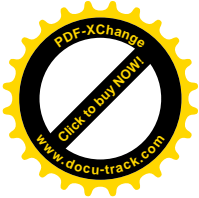
➤ **Bidang Penataan Ruang**

Permasalahan utama pada Bidang Penataan Ruang adalah:

- (1) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
- (2) Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;
- (3) Menurunnya ketersedianya ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
- (4) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi;
- (5) Belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat–pusat pertumbuhan di Jawa Barat.

➤ **Bidang Perumahan**

Permasalahan utama adalah rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin dan buruh serta tingginya *backlog* (tidak seimbang) kebutuhan dan penyediaan) rumah sebanyak 1,3 juta rumah.



PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

2.1.1 Visi dan Misi

Dinas Permukiman dan Perumahan di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Barat berperan dalam merealisasikan visi pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2013– 2018, yaitu **"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"**, yang akan tercapai melalui misi yaitu :

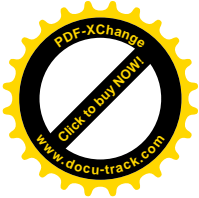
1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal.

Untuk mewujudkan pencapaian target visi dan misi ini, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota sangat mendukung, sehingga keserasian dan sinkronisasi antar elemen pemerintahan di Jawa Barat sangat diperlukan.

Dalam hubungannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdapat satu misi yang didukung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, yaitu :

Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan (Misi ke-4)

Sebagai langkah awal dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat, setiap OPD perlu memiliki Rencana Strategis dengan didalamnya tertuang visi dan misi. Oleh karena itu, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman telah merumuskan Rencana Strategis dalam upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Visi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018, yaitu :**"Terwujudnya Permukiman & Perumahan Yang Produktif, Harmonis dan**



Berkelanjutan dalam Mendukung Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera". Adapun penjelasan dari visi tersebut, yaitu :

- ❖ **Produktif** : Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai *sarana pendidikan* keluarga, *persemaian budaya* dan *pengembangan ekonomi dengan partisipasi penuh masyarakat* menuju kemandirian.
- ❖ **Harmonis** : Mendorong harmonisasi *antar wilayah dan antar sektor, antar jenjang pemerintahan, antar daerah, dan antar pelaku pembangunan*.
- ❖ **Berkelanjutan** : Mendukung pembangunan *berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana* yang mengacu pada *tata ruang dan budaya lokal*.
- ❖ **Mendukung Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera** : Menjadi OPD utama dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab menjalankan misi ke-empat dari pembangunan menuju Jawa Barat yang maju dan sejahtera.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, maka dijabarkan ke dalam misi-misi berikut:

1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif;
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan prasarana dan sarana kawasan permukiman;
3. Meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan pengujian mutu konstruksi dan lingkungan yang berkualitas;
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance*.

Pencapaian pembangunan di Jawa Barat tidak terlepas dari tahapan perencanaan pembangunan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang daerah maupun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang diimplementasikan melalui visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai Perda Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan **urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman** berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan maka telah disusun dokumen perencanaan yang menjadi arahan program pembangunan sebagai pedoman bagi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 2013-2018.

Dalam siklus perencanaan Dinas Permukiman dan Perumahan, komponen

yang paling dasar adalah Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat meliputi komponen rencana organisasi yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program. Adapun arahan pokok dalam perencanaan pembangunan Bidang Permukiman dan Perumahan seperti ditunjukkan pada **Gambar II.1** di bawah ini.



Gambar II.1 Arahan Pokok dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Permukiman dan Perumahan (*Renstra Diskimrum Jabar Tahun 2013-2018*)

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi dan misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dijabarkan melalui tujuan, sasaran, hingga arah kebijakan. Strategi dan kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Permukiman dan Perumahan. Adapun penjabaran visi dan misi Dinas Permukiman dan Perumahan ditunjukkan seperti pada Tabel II.1 berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif				
1. Mewujudkan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang nyaman	Meningkatnya ketersediaan rencana penataan ruang di Jawa Barat	Jumlah ketersediaan Perda RTR KSP di Jawa Barat	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian	Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kawasan
		Jumlah ketersediaan Perda RDTR kabupaten kota di Jawa Barat	Meningkatkan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing	Meningkatkan kinerja perencanaan tata ruang kawasan strategis



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Terfasilitasinya perwujudan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat	Meningkatkan Pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terstandar dan terintegrasi	Meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan Penguatan sistem informasi penataan ruang dan pembangunan permukiman dan perumahan
	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	Meningkatkan penguatan pengendalian dan pengawasan penataan ruang.	Menyiapkan perangkat dan pemantapan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang kawasan
Misi 2 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman				
1. Mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak huni	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum Regional	Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan Meningkatkan koordinasi dan mendorong kerjasama antar daerah dalam mendukung pengembangan pengelolaan air minum regional	Meningkatkan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik, Persampahan dan Drainase Perkotaan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Meningkatkan akses pengolahan air limbah bagi 948.400 KK	peningkatan prasarana sanitasi pada kawasan yang memiliki area resiko sanitasi
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan yang semula 63% menjadi 73%)	Meningkatkan sarana pengangkutan dan prasarana pengolahan persampahan, sebagai layanan terhadap 1.094.585 KK	penanggulangan persampahan secara utuh mulai dari hulu (sumber timbulan) sampai hilir (pembuangan akhir)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Tingkat kinerja Drainase (penurunan jmlh kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	Mengurangi jumlah genangan di permukiman semula 60 Ha menjadi 32 Ha	Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dan sarana drainase perkotaan; Drainase berwawasan Lingkungan - Zero Delta Q Run Off
2. Mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak huni	Mengurangi timbulan sampah di sumber dengan program 3R	Peningkatan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri di setiap kabupaten/kota	Mensosialisasikan program penetapan target pengurangan sampah di tiap kabupaten/kota	Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah pola 3R
	Mengembangkan teknik pengelolaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional	Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan sampah	Menyediakan TPPAS Regional di 3 PKN
		Pembangunan TPPAS Regional Nambo		
		Penataan Lahan Bekas TPA Leuwigajah		
		Pengelolaan TPK Sarimukti		
		Persiapan Pembangunan TPPAS Regional Ciayumajakuning		
		Peningkatan kapasitas pengangkutan sampah di kabupaten/kota		Memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pengangkutan sampah di kabupaten/kota
	Meningkatkan kualitas TPA di kabupaten/kota	Pengurangan jumlah TPA open dumping di kabupaten/kota		Memfasilitasi program peningkatan kualitas TPA di kabupaten/kota
	Meningkatnya Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang memiliki pranata/NSPK Bangunan Gedung (Perda BG)	Menyelenggarakan penataan bangunan gedung agar tertib, fungsional, aman, andal dan efisien	Mewujudkan bangunan gedung yang andal, fungsional dan berjiwa diri

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
3. Mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak huni terpadu, dan berkelanjutan		Jumlah penataan kawasan potensial atau memiliki nilai strategis dan penataan kawasan permukiman yang memiliki penurunan fungsi kawasan	Mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang mengalami penurunan fungsi kawasan	serta memenuhi persyaratan demi terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung
		Jumlah Kawasan/Wilayah Rawan Bencana Kebakaran yang memiliki sistem penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di kab/kota	
		Tersedianya kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	Meningkatkan jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	
		Tingkat kualitas lingkungan perumahan yang tidak layak huni di 8 Kota di Jawa Barat	Fasilitasi penyediaan perumahan formal dan swadaya melalui program rumah murah dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	
	Meningkatnya ketersediaan perumahan melalui pengembangan perumahan formal dan swadaya		Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa dan rumah murah sewa	Menciptakan Lingkungan Perumahan dan rumah layak huni dan terjangkau dalam mendukung Jawa Barat maju dan sejahtera
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan rumah tidak layak huni di kawasan perkotaan	Fasilitasi penataan dan penanganan lingkungan perumahan tidak layak huni perkotaan	
		Terbangunnya rumah yang layak huni di kota di Jawa Barat	Fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan perkotaan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekitar pondok pesantren	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Pengembangan pengelolaan lingkungan permukiman sekitar pondok pesantren dan masjid	
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan strategis / desa pusat pertumbuhan	Meningkiatnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan potensial dan strategis	Fasilitasi penataan lingkungan permukiman	
	Meningkatkan pengelolaan perbaikan rumah tidak layak huni bagi MBR	Meningkatnya kualitas perumahan bagi MBR	Pengendalian pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni bagi MBR	
Misi Ketiga : Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang Berkualitas				
1. Meningkatkan pelayanan jasa Konstruksi	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Tingkat sertifikasi SDM Jasa Konstruksi	Meningkatkan profesionalisme SDM Jasa Konstruksi	Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM bidang jasa konstruksi
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pembangunan gedung negara/ daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah		
		terlaksananya bimtek pengelola kegiatan pembangunan bangunan gedung negara/daerah		meningkatkan pembinaan dan sinergitas pembinaan penyelenggaraan Jasa konstruksi guna mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance & mengoptimalkan sistem pengelolaan teknis dan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara /daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Jumlah pembangunan bangunan gedung negara/daerah yang termonitor		meningkatkan tertib usaha, penyelenggaraan jasa konstuksi dan pemanfaatan
		Jumlah instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah dan Rumah Negara	Meningkatkan profesionalisme SDM Jasa Konstruksi	mengoptimalkan sistem pengelolaan teknis dan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara /daerah
		Tersusunnya Daftar Harga Bahan/Upah dan Harga satuan Pekerjaan Bangunan Gedung Negara		
3. Meningkatkan pelayanan bidang konstruksi dan lingkungan	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal menuju terselenggaranya pembangunan konstruksi berkualitas dan berwawasan lingkungan.	Terlayannya seluruh permintaan pengujian mutu konstruksi dan lingkungan	Menciptakan pelayanan prima kepada pelanggan	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
				Meningkatkan kondisi dan akomodasi laboratorium
				Memenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja
Misi Keempat : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Prinsip Good Governance				
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Dinas	Tingkat Kehadiran Aparatur		Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas
		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya.		
	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tupoksi Dinas	Terlayannya kebutuhan/tuntutan dinas akan sarana dan prasarana	Menyelenggarakan kebutuhan/ tuntutan dinas akan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatkan dukungan saran dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi
	Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap	Menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat diakses	Meningkatkan pelayanan administrasi dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
		elayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Informasi perkantoran
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang permukiman dan perumahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang diselesaikan tepat waktu	Mewujudkan pelaporan yang tepat waktu, akurat dan akuntabel	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sumber : Renstra Diskimrum, 2013-2018

2.1.3 Kebijakan dan Program

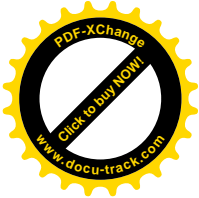
Berdasarkan rumusan strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, program yang akan dituangkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

❖ **Bidang Tata Ruang Kawasan melalui kebijakan dan program pembangunan sebagai berikut:**

1. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kawasan melalui program penataan ruang;
2. Meningkatkan kinerja perencanaan tata ruang kawasan strategis melalui program penataan ruang;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan melalui program penataan ruang;
4. Penguatan sistem informasi penataan ruang dan pembangunan permukiman dan perumahan melalui program penataan ruang;
5. Menyiapkan perangkat dan pemantapan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan pengawasan penataan ruang kawasan melalui program penataan ruang.

❖ **Bidang Permukiman dengan kebijakan dan program sebagai berikut :**

1. Menyiapkan pranata pengembangan sarana dan prasarana permukiman melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dan sarana persampahan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
3. Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dan sarana air limbah domestik melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;



4. Meningkatkan peluang kerjasama dan pembiayaan penyedia prasarana dan sarana permukiman melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
5. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya dan diselenggarakan serta tertib, didukung peran masyarakat untuk menjamin kemanfaatan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
6. Mewujudkan kawasan permukiman yang menjamin keselamatan dan kemudahan bagi masyarakat melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang mengalami penurunan fungsi kawasan melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Terlaksananya pengelolaan dan bertambahnya jumlah kawasan ruang terbuka hijau melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
9. Meningkatkan jangkauan (akses) masyarakat terhadap sarana dan prasarana air minum perkotaan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
10. Meningkatkan jangkauan (akses) masyarakat terhadap sarana dan prasarana Air Minum perdesaan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

❖ **Bidang Perumahan dengan kebijakan dan program sebagai berikut :**

1. Menyiapkan pranata serta meningkatkan sinergitas dan pembagian peran dalam pembangunan rumah dan peningkatan kualitas perumahan melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Fasilitasi pembangunan rumah skala besar, rusunawa dan rusunami melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Fasilitasi pembangunan rumah swadaya melalui dana bergulir, kredit mikro, *Corporate Social Responsibility* dan lembaga donor melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;



5. Fasilitas perbaikan rumah dan lingkungan serta penataan kawasan perumahan melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Fasilitas penataan perumahan kawasan khusus, strategis melalui pemberdayaan komunitas dan sinergitas pelaku pembangunan melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Pengelolaan dan Pelayanan Fasilitas Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Murah melalui Program Pengembangan Perumahan.

❖ **Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan (BPPP) dengan kebijakan dan program sebagai berikut :**

1. Melakukan Pemeliharaan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) agar dapat berhasil guna dan berdaya guna sehingga mencapai pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat di daerah;
2. Melakukan pengelolaan Rusunawa untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa yang terbagi menjadi 2 (dua) sub unit yaitu Rumah Susun Umum Sederhana Sewa dan Rumah Murah.

❖ **Bidang Jasa Konstruksi dengan kebijakan dan program sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kualitas lembaga dan SDM bidang jasa konstruksi melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan gedung dan rumah Negara melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan gedung dan rumah negara melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Menyelenggarakan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung melalui Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. Terlaksananya peningkatan pelayanan bidang konstruksi dan lingkungan (tanah, bahan bangunan dan aspal) dan lingkungan (kualitas air permukaan, air tanah, air limbah, udara bebas/ambient dan emisi cerobong tidak bergerak) melalui 3 (tiga) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;



6. Terciptanya laboratorium rujukan bagi Kab/Kota melalui 3 (tiga) yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.

❖ **Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) dengan kebijakan dan program sebagai berikut :**

1. Meningkatkan pengelolaan TPA Sarimukti hingga nantinya ditutup pada tahun 2018;
2. Melakukan percepatan pembangunan TPPAS Legok Nangka dan Nambo yang direncanakan dapat beroperasi pada tahun 2018;
3. Menyiapkan pembangunan TPPAS Ciayumajakuning;
4. Menata kembali TPA Leuwigajah;
5. Memberi bantuan teknis kepada Kab/Kota dalam peningkatan kualitas TPA Kab/Kota menjadi *sanitary landfill*.

Adapun seluruh kegiatan BPSR difasilitasi melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

❖ **Sekretariat dengan kebijakan dan program sebagai berikut :**

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan yang diambil dari Renstra Dinas. Sebagai

bagian dari pelaksanaan tupoksi Dinas, berikut dituangkan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2016 sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2016.

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RTR KSP di Jawa Barat	1 Dokumen
	Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RRTR Kabupaten Kota di Jawa Barat	3 Dokumen
Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	70 %
Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	70%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	65%
	Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	67%
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	2 Kawasan
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,78 %
Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat	31 %
Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	1.320 Sampel
Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	80 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	40 Orang
Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perumahan dan Perumahan	85 %

Sumber : Renstra Diskimrum. 2013-2018

Dalam rangka perwujudan pencapaian pembangunan di bidang permukiman dan perumahan, pada tahun 2016 ditekankan pada 14 (empat belas) program dengan 76 (tujuh puluh enam) kegiatan yang menyangkut aspek teknis (penyelenggaraan pembangunan fisik/non fisik) dan aspek non teknis (penyelenggaraan pemerintahan). Berikut ini uraian pelaksanaan kegiatan Dinas tahun 2016 :

1. Program Sumber Daya Kesehatan

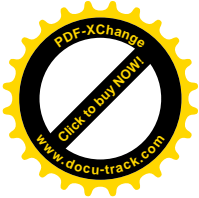
Yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru RS Paru Provinsi Jawa Barat;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan

Yang terdiri dari 24 (dua puluh enam) kegiatan, yaitu :

- 1) PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu;
- 2) PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya
- 3) PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran;
- 4) METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon RayaMETR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya;
- 5) METR - Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya;
- 6) METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur;
- 7) GCB - Monitoring dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum



- 8) SANI - Monitoring dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi Jawa Barat;
- 9) Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka;
- 10) Pembangunan TPPAS Regional Nambo;
- 11) Pengembangan SPAM Perdesaan;
- 12) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat;
- 13) Pengelolaan TPK Sarimukti;
- 14) Advisory Teknis BPSR;
- 15) Penyusunan Rencana Induk Persampahan dan TPPAS Regional Ciayumajakuning;
- 16) Penataan TPA Leuwigajah;
- 17) Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat;
- 18) Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa;
- 19) METR Pengembangan SPAM Metropolitan Bandung Raya;
- 20) METR Penyusunan Rencana Induk SPAM Jawa Barat;
- 21) Penyusunan Kebijakan SPAM Jawa Barat;
- 22) Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage;
- 23) Penataan Kawasan Gasibu Tahap II;
- 24) Konsep Pembangunan *Public Art Work Sister Province* Jawa Barat dan Australia Selatan.

3. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi;
- 2) Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara;
- 3) Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

4. Program Penataan Ruang

Yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan;
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat;
- 3) Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat;
- 4) Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- 5) Penyusunan Studi Kelayakan Penataan *Karst* Citatah;
- 6) METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
- 7) METR Perencanaan Kawasan Perkotaan *Water Front City* Cirebon;
- 8) METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor;
- 9) Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini;

- 10) CLTH-Perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan;
- 11) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hasil Review RTRWP Jawa Barat.

5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan.

6. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu :

- 1) Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor;
- 2) Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Permukiman dan Perumahan;
- 3) Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan;
- 4) Perencanaan dan Identifikasi Lokasi Pembangunan Rusunawa di KSP Jatinangor, Kota/Kab. Sukabumi dan Kab/Kota. Cirebon;
- 5) RTLH_Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan;
- 6) Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat;
- 7) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat;
- 8) METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandung Raya;
- 9) METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya;
- 10) METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bodebekkarpur;
- 11) PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran;
- 12) PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu;
- 13) PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya;

7. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olahraga

Yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- (1) PONPAR Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat;
- (2) PONPAR Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat

8. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR;
- 2) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- 3) Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL-Diskimrum;
- 4) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB.

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan *fixed cost*, yaitu

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB;
- 2) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum;
- 3) Peningkatan dan Pelayanan BPMKL;
- 4) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- 5) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSR.

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan *fixed cost*, yaitu :

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR (Revitalisasi);
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- 3) Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum;
- 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB.

11. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan *fixed cost*, yaitu :

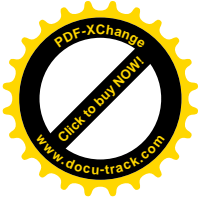
- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR;
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
- 3) Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL;

12. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan *fixed cost*, yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan

13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal

14. Program Pengembangan Nilai Budaya

Yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- 1) Peningkatan Penyusunan DED Museum Jatigede

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan Dinas dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah :

- (1) Sebagai wujud nyata komitmen Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat terhadap Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga terus dapat meningkatkan kinerja dengan perubahan yang dinamis dan realistis;
- (4) Sebagai dasar pimpinan daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan dan kinerja Dinas sebagai OPD;
- (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan target kinerja pada tahun anggaran 2016 ini tidak terlepas dari pencapaian *outcome* atau kinerja Dinas pada tahun 2015 dan sebelumnya sehingga terus berkesinambungan. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2016. Adapun target kinerja yang telah diperjanjikan seperti ditunjukkan pada **Tabel II.2**.

Tabel II.2 Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2016
(1)		(2)	(3)
Meningkatnya Ketersediaan Rencana		Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RTR KSP di Jawa Barat	1 Dokumen

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016
(1)	(2)	(3)
Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RRTR Kabupaten Kota di Jawa Barat	3 Dokumen
Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	70 %
Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	70%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	65%
	Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	67%
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	2 Kawasan
Meningkatnya Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,78 %
Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat	31 %
Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	1.320 Sampel
Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	80 %
Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	40 Orang
Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perumahan dan Perumahan	85 %

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja, 2016

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2016

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Tabel II.3 Rekap Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 setelah Perubahan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
1	Program Sumber Daya Kesehatan	2	14.355.990.600
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	24	105.709.643.350
3	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	3	3.223.651.000
4	Program Penataan Ruang	11	5.565.643.000
5	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	1	99.336.850
6	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	72.885.583.300
7	Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga	2	59.971.877.200
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	4	1.921.332.400
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5	8.856.088.900
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	7.341.420.650
11	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	22.155.720.100
12	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	1	98.440.000
13	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	1	79.800.000
14	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	1.492.245.000
Jumlah	Belanja Langsung		303.756.772.350
	Belanja Tidak Langsung		28.018.235.867
Total		76	331.775.008.217

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2016



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh pada **Tabel III.1** berikut ini.

Tabel III.1 Skala Penilaian

No	Kategori	Rata-rata % Capaian	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75,00 – 89,99	
3	Cukup	65,00 – 74,99	
4	Kurang	50,00 – 64,99	
5	Sangat Kurang	0 – 49,99	

Sumber : *Persiapan Evaluasi Akip dan RB Tahun 2016*

- **Indikator Kinerja** adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus rnenenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.
- **Indikator Kinerja Utama (IKU)** merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi



serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

- Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- ◆ Kelompok indikator masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- ◆ Kelompok indikator keluaran (*outputs*), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- ◆ Kelompok indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pencapaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan dalam prosentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi pencapaian kinerja, maka pencapaian kinerja semakin baik, Adapun perhitungan capaian kinerja ditentukan dengan persamaan :

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$



2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Presentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun data kinerja yang dipergunakan Dinas lebih dititikberatkan pada data internal, yang diperoleh dari setiap bidang dengan mengacu pada SOP pengumpulan data sebagaimana dilampirkan pada **Lampiran 4.C**. Pada penentuan indikator *benefit* dan *impact*, diperlukan data eksternal yang membutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Namun karena mekanisme yang mengatur hal ini belum tersedia, maka penentuan indikator *benefit* dan *impact* ini masih menggunakan data internal yang tersedia, Adapun indikator yang dimaksud sebagaimana ditunjukkan pada **Lampiran 1**. Evaluasi dilakukan sampai dengan pengukuran terhadap capaian indikator *input*, *output* dan *outcome*.

3.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk itu, progress atau kemajuan Dinas dalam pencapaian implementasi sasaran strategisnya hanya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Lebih jelasnya seperti pada **Tabel III.2** berikut ini :

Tabel III. 2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target* 2016 Nilai	Realisasi** 2016 Nilai	Terhadap Indikator Kinerja 2016 Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 1 : Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif						
1	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RTR KSP di Jawa Barat	Dokumen	1	1	100,00%
2	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat	Dokumen	3	2	66,67%
3	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	%	70	67	95,71%
Misi 2; Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman						
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	70	71,14	101,63%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target* 2016 Nilai (5)	Realisasi** 2016 Nilai (6)	Terhadap Indikator Kinerja 2016 Nilai (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	65	65,64	100,98%
		Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	%	67	66,26	98,90%
5	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	Kawasan	2	2	100%
6	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,78	92,78	100%
Misi 3: Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang Berkualitas.						
7	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	%	31	50,25	162,10%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target* 2016 Nilai (5)	Realisasi** 2016 Nilai (6)	Terhadap Indikator Kinerja 2016 Nilai (7)
(1)	(2)	(3)	(4)			
8	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	Sampel	1.320	3875	293,56%
9	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	%	80	80	100,00%
Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Prinsip Good Governance						
10	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	Orang	40	65	162,50%
11	Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	%	85	78	91,76%

Sumber : *Perjanjian Kinerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2016

** Hasil Perhitungan

Hasi pengukuran capaian kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya pencapaian kinerja Dinas telah mencapai lebih dari 90%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel III.2 terlihat 12 (dua belas) dari 13 (tiga belas) indikator kinerja pencapaiannya lebih dari 90%.

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2016 rata-rata terkategori sangat baik, karena rata-rata pencapaiannya lebih dari 90%. Meskipun demikian pada Tabel III.2 tersebut, *trend*/perkembangan dari tahun ke tahunnya tidak terlihat. Adapun perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya ditunjukkan seperti pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014-2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja Tahun -			Kategori Pencapaian 2016
			2014*	2015**	2016***	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI I : Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif						
1	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RTR KSP di Jawa Barat	N/A	50,00%	100,00%	Sangat Baik
		Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat	N/A	0,00%	66,67%	Cukup
2	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	N/A	100,00%	95,71%	Sangat Baik
MISI II : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman						
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	103,86%	95,00%	101,63%	Sangat Baik
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	99,00%	92,90%	100,98%	Sangat Baik
		Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	99,00%	96,54%	98,90%	Sangat Baik
5	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	100,00%	100,00%	100,00%	Sangat Baik
6	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100,00%	92,70%	100%	Sangat Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja Tahun -			Kategori Pencapaian 2016
			2014*	2015**	2016***	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MISI III : Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang Berkualitas.						
7	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat	93,1	89,21%	162,10%	Sangat Baik
8	Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	N/A	139,58%	293,56%	Sangat Baik
9	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	N/A	80,00%	100,00%	Sangat Baik
MISI IV : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Prinsip Good Governance						
10	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	200,00%	200,00%	162,50%	Sangat Baik
11	Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	N/A	82,64%	91,76%	Sangat Baik

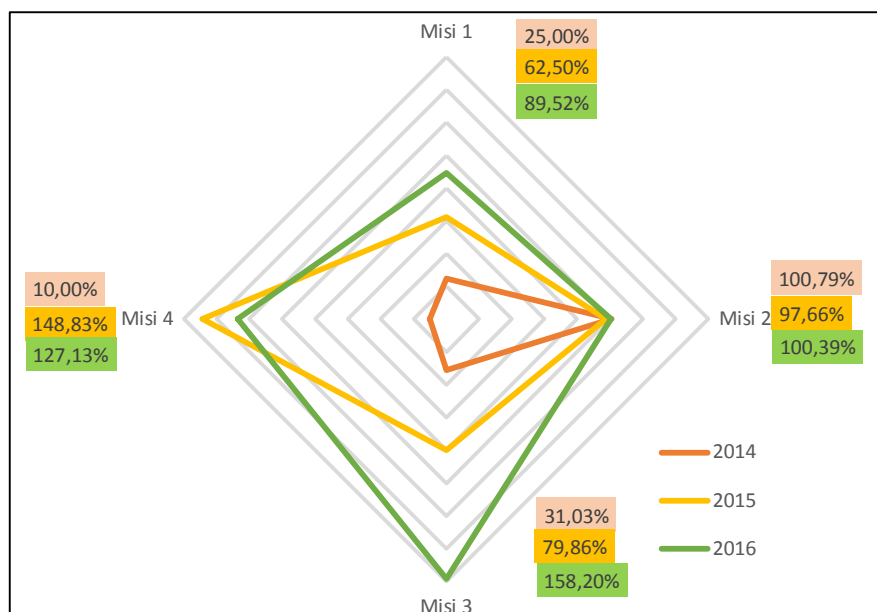
Sumber : *LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2014

**LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2015

*** Hasil Pengukuran, 2016

Pencapaian indikator sasaran Dinas Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016, menunjukkan bahwa pencapaian terendah adalah sebesar 66,67%, meskipun demikian secara umum ter kategorikan **“Sangat Baik”**. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap pencapaian misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

Setiap pencapaian indikator sasaran tersebut berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Berikut ini disajikan perkembangan setiap misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014-2016, seperti ditampilkan pada Gambar III.1



Gambar III.1 Rekapitulasi Pencapaian Misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Perkembangan pencapaian misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2014-2016 menunjukkan peningkatan dan penurunan yang berarti. Meskipun demikian ditinjau dari pencapaian terendahnya pada tahun 2016, tidak kurang dari 80%. Sehingga pencapaian Misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat dikategorikan **“sangat baik”**.

Pencapaian misi terendah adalah pada misi 1, sebesar 89,52%. Sedangkan pencapaian misi tertinggi adalah pada misi 3, sebesar 158,20%. Tingginya pencapaian misi 3 didukung oleh tingginya pencapaian pada indikator kinerja “Jumlah contoh uji yang dapat dilayani” dengan pencapaian kinerja sebesar 293,56%. Secara terperinci dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dibahas pada sub bab 3.1.5.

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis sebagaimana dilakukan melalui aplikasi *esakip* diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan tingkat efisiensinya terhadap sumber daya (keuangan) yang ada.

Berdasarkan Tabel III.4, diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) indikator yang melebihi nilai yang ditargetkan. Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan seperti pada Tabel III.4.

Tabel III. 4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Kajian Perda RTR KSP di Jawa Barat	100	97,85	2,15%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan Air Minum	Cakupan Pelayanan Air Minum	100,2	93,91	6,09%
3	Meningkatnya jumlah Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100	58,16	41,84%
4	Meningkatnya jumlah Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100	94,36	5,64%
5	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	100	93,47	6,53%
6	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	100	43,93	56,07%
7	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	100	76,71	23,29%
8	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Jumlah kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	100	89,59	10,41%
9	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi baik penyedia jasa maupun penggunaan jasa konstruksi	Persentase sertifikasi SDM Jasa Konstruksi	102,55	91,66	8,34%
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	100	85,48	14,52%

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Melayani kebutuhan uji mutu konstruksi dan lingkungan menuju terselenggaranya pembangunan konstruksi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	293,56	73,72	26,28%
12	Terwujudnya SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi	185,71	78,34	21,66%

Sumber : Aplikasi e-sakip, 2016

Melalui pendekatan ini indikator-indikator sasaran yang telah tercapai (100%) dapat ditentukan tingkat efisiensinya. Meskipun demikian hal ini tidak mutlak berarti seluruh output kegiatan tercapai sepenuhnya, meskipun seluruh indikator sasaran di atas pencapaian kinerjanya lebih dari atau sama dengan 100%. Adapun program dan kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator –indikator sasaran tersebut ditampilkan seperti pada **Tabel III.5**.

3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari setiap misi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dapat ditentukan melalui evaluasi pencapaian *output* dari setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing misi tersebut. Berikut ini merupakan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Permukiman dan Perumahan Provisni Jawa Barat Tahun 2016.

AKUNTABILITAS KINERJA I

Tabel III. 5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target*	Realisasi**	Capaian Terhadap Indikator Kinerja 2016	Dukungan program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 1 : Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif										
1	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Perda RTR KSP di Jawa Barat	Dokumen	1	1	100,00%	Program Penataan Ruang	3.546.948.000,00	3.470.717.800,00	97,85%
							1 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan	456.640.000,00	445.596.300,00	97,58%
							2 METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur Kabupaten Bogor	927.635.000,00	927.610.000,00	100,00%
							3 METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Water Front City Cirebon	31.800.000,00	14.150.000,00	49,69%
							4 METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor	695.159.000,00	681.494.000,00	100,00%
							5 CLTH-Perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan	283.785.000,00	281.598.500,00	100,00%
							6 Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Ciatlah	830.704.000,00	803.249.000,00	99,79%
							7 Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat	321.225.000,00	317.020.000,00	100,00%
	Jumlah Ketersediaan Perda		Dokumen	3	2	66,67%	Program Penataan Ruang	469.325.000,00	453.766.500,00	96,68%



AKUNTABILITAS KINERJA I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target* 2016	Realisasi** 2016	Capaian Terhadap Indikator Kinerja 2016	Dukungan program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat					1 Evaluasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	469.325.000,00	453.766.500,00	99,38%
2	Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	%	70	67	95,71%	Program Penataan Ruang 1 Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hasil Review RTRWP Jawa Barat 2 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat 3 Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini	1.549.370.000,00 700.235.000,00 849.135.000,00 0	1.407.205.283,00 652.818.783,00 754.386.500,00 0	90,82% 97,60% 93,63% 0,29%
Misi 2: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman								254.415.357.450,00	183.943.972.185,00	72,30%
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	70	71,14	101,63%	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1 Pengembangan SPAM Perdesaan 2 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat	22.600.355.000,00 551.150.000,00 283.000.000,00	21.224.509.400,00 176.895.000,00 35.990.000,00	93,91% 44,58% 12,71%